

**PENGELOLAAN MANAJEMEN KEUANGAN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN  
(Studi pada sekolah Al-Islam dan Muhammadiyah di Surakarta)**

**Risa Alkurnia<sup>1</sup>, Aulia Anggraini<sup>2</sup>**

<sup>1)</sup> Program Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret

<sup>2)</sup> Program Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret  
risalprada@gmail.com, anggrainiaulia19@gmail.com

**ABSTRAK**

*Tujuan dari penulisan paper ini adalah untuk memberikan suatu analisis deskriptif mengenai pengelolaan manajemen keuangan di instansi pendidikan. Institusi pendidikan yang mana bergerak dalam kegiatan nirlaba juga melakukan proses manajemen. Institusi pendidikan dituntut untuk melaksanakan proses manajemen yang optimal berdasarkan konsepsi manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dalam menetapkan berbagai kebijakan internal sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu dan kinerja sekolah secara keseluruhan. Berdasarkan pengambilan data dilakukan di MA Al-Islam Surakarta dan SMP Muhammadiyah 4 Sukodono, kedua sekolah tersebut berbasis yayasan yang mana sebagian besar sumber pendapatan berasal dari Yayasan, SPP dan pemerintah, berbeda halnya dengan sekolah negeri yang berasal dari BOS. Secara praktis hasil penulisan dari artikel ini diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai pengelolaan keuangan pada lembaga sekolah swasta dimulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating), pencatatan, pertanggung jawaban atau pengawasan (controlling) serta pelaporan (reporting) yang berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.*

**Kata Kunci:** seminar nasional, manajemen keuangan, lembaga pendidikan.

**ABSTRACT**

*The purpose of this paper is to provide a descriptive analysis of the financial management arrangements educational institution. Educational institution which is engaged in non-profit activities also perform management processes. Educational institutions are required to implement the optimal management process based on the conception of school-based management (SBM). SBM aims to empower schools in the school setting various internal policies that lead to improved quality and overall school performance. Based on the data collection was done in MA Al-Islam and SMP Muhammadiyah 4 Sukodono, the second school based foundation which is mostly a source of revenue comes from the Foundation, SPP and the government, unlike the case with public schools comes from the BOS. In practical terms the results of writing of this article is expected to provide insight into the financial management of the institution of private schools starting from planning, actuating, Controlling, and reporting which based of principles of fairness, efficiency, transparency, and public accountability.*

**Keywords:** national seminar, financial manajemen, educational institution.

**I. PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan penting saat ini. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Salah satu unsur yang penting dimiliki oleh suatu sekolah agar sekolah dapat berjalan dengan baik adalah dari segi keuangan adalah pengelolaan keuangan. Menurut Wijaya (2009) bahwa pendidikan yang

mahal tidak secara otomatis menunjukkan kualitas pendidikan yang tinggi, karena tinggi rendahnya biaya pendidikan ditentukan oleh manajemen keuangan sekolah.

Sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sehingga uang yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah bahwa pengelolaan uang adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal. Sekolah sebagai institusi pemerintah diawasi oleh kepala sekolah dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga menjelaskan bahwa pengendalian internal dan pengawas fungsional daerah serta Badan Pemeriksa Keuangan dalam pengendalian fungsional.

Pengelolaan keuangan sekolah didasari pada prinsip-prinsip yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yaitu prinsip transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien. Peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa keempat prinsip tersebut digunakan dalam proses pengelolaan keuangan sekolah yang dimulai dari perencanaan, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan, pengawasan dan pemeriksaan hingga pertanggungjawaban. Sekolah baik negeri maupun sekolah swasta memiliki tugas yang sama untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Sekolah swasta merupakan institusi pendidikan yang mencari sumber keuangan sendiri dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan. Guna mencapai pelayanan kualitas pendidikan yang optimal, sekolah swasta harus melakukan pengelolaan keuangan. Di daerah Surakarta yayasan pendidikan yang berkembang pesat yaitu yayasan Muhammadiyah dan yayasan Al Islam.

Yayasan Muhammadiyah adalah organisasi islam yang besar di Indonesia. Muhammadiyah pada masa Pergerakan Nasional berdiri sebagai sebuah organisasi yang bergerak pada bidang agama, sosial, dan pendidikan. Bidang agama yaitu dengan mengadakan dakwah islam, bidang sosial yaitu salah satunya dengan mendirikan panti asuhan, dan bidang pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah mulai dari sekolah TK hingga Perguruan Tinggi. Salah satu sekolah yang didirikan Yayasan Muhammadiyah di daerah sragen adalah SMP Muhammadiyah 4 Sukodono.

Tidak jauh berbeda dengan yayasan Muhammadiyah, yayasan Al-Islam pun merupakan organisasi Islam yang salah satunya bergerak dalam bidang pendidikan. Al-Islam mendirikan sekolah dari Taman Kanak-kanak hingga Madrasah Aliyah. Salah satu sekolah yang didirikan Yayasan Al-Islam di daerah Surakarta adalah MA Al-Islam Surakarta.

Pengelolaan keuangan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua sekolah. Akan tetapi setiap sekolah memiliki perencanaan dan pengelolaan yang berbeda-beda. Untuk itu perlu perlu dikaji untuk mengetahui aktivitas pengelolaan keuangan di SMP Muhammadiyah 4 Sukodono dan MA Al-Islam Surakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana aktivitas pembiayaan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam?
2. Bagaimana pengelolaan pembiayaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam?
3. Apakah penerapan pengelolaan keuangan di Lembaga Pendidikan sesuai dengan teori pengelolaan keuangan?

## **C. Tujuan**

1. Mengetahui aktivitas pembiayaan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam.
2. Mengetahui pengelolaan pembiayaan pendidikan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam
3. Apakah penerapan pengelolaan keuangan di Lembaga Pendidikan sesuai dengan teori pengelolaan keuangan.

## **D. Tinjauan Pustaka**

## **1. Prinsip Pengelolaan Keuangan Sekolah**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Prinsip tersebut selaras dengan reformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah (Renstra Ditjen Dikmen) memperhatikan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Reformasi birokrasi tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada rencana strategis 2010-2014 dan misi 5K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian, sebagai landasan perencanaan pelaksanaan program reformasi birokrasi. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah juga dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini akan mendalami prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1) Keadilan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 Ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah dilakukan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada calon dan atau peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Kesempatan tersebut antara lain, (1) pelayanan khusus kepada siswa berkebutuhan khusus dan atau yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa, (2) akses pendidikan kepada calon dan atau peserta didik, (3) kesempatan dalam melanjutkan pendidikan (Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Dalam rangka pemerataan pendidikan yang berprinsip keadilan, sekolah juga diharuskan mengelola keuangan yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah MA adalah program pemerintah untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan menengah yang terjangkau dan bermutu (Petunjuk Teknis BOS MA 2014). Beberapa tujuan diselenggaranya BOS MA adalah untuk mewujudkan keberpihakan pemerintah bagi siswa miskin SMA dengan membebaskan dan atau membantu tagihan biaya sekolah bagi siswa miskin dan memberikan kesempatan yang setara bagi siswa miskin SMA untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Selain itu, Program Ramah Sosial juga diamanatkan kepada sekolah berkualitas dengan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yaitu dengan aktif dalam mengidentifikasi dan merekrut siswa miskin yang memiliki minat dan potensi untuk mengikuti pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, sekolah juga diamanatkan untuk melakukan mekanisme subsidi silang dan atau mencari sumber dana sejenis dari pemerintah daerah, masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat dan sukarela bagi siswa miskin.

Selain dana BOS, sekolah juga diamanatkan mengelola dana Bantuan Siswa Miskin. Bantuan Siswa Miskin merupakan amanat konstitusi yang diimplementasikan melalui kebijakan menyubsidi biaya pendidikan bagi siswa miskin. Tujuannya antara lain memberikan peluang bagi lulusan SMP dan sederajat untuk melanjutkan sekolah, mencegah siswa miskin putus sekolah, dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada siswa miskin untuk terus bersekolah (Panduan Pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin SMA 2014).

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan landasan pengelolaan keuangan sekolah dalam merencanakan pendapatan, alokasi keuangan dan pemberian pelayanan yang optimal kepada siswa, guru, karyawan sebagai bentuk pemerataan pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan mengenai prinsip efisiensi yang berkaitan dengan realisasi anggaran dalam pengelolaan keuangan sekolah.

### **2) Efisiensi**

Efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dilakukan dengan mengoptimalkan akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008). Efisiensi pada dunia pendidikan memiliki kaitan antara pendayagunaan sumber-sumber pendidikan yang terbatas untuk mencapai optimalisasi yang tinggi (Fattah, 2012:35). Halim (2012:133) mendefinisikan proses kegiatan operasional yang efisien jika suatu produk atau hasil kerja dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Dalam pengelolaan keuangan sekolah, prinsip efisiensi dapat diimplemetasikan dengan efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Fattah (2012:36) mengemukakan bahwa efisiensi internal akan menghasilkan output yang diharapkan dengan biaya minimal. Perbandingan antara biaya input pendidikan dan efektivitasnya dalam mendukung hasil-hasil belajar sebagai konsep efisiensi internal juga menekankan pada pemberian rangsangan yang dapat memotivasi perilaku siswa, guru dan kepala sekolah. Selanjutnya, Fattah (2012:38) juga menjelaskan bahwa efisiensi eksternal sering dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*, yaitu rasio antara keuntungan finansial sebagai hasil pendidikan dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan. Selain dihubungkan dengan metode *cost benefit analysis*, efisiensi eksternal juga dikaitkan dengan analisis keuntungan atas investasi pendidikan dari pembentukan kemampuan, sikap, dan keterampilan. Efisiensi ini bertujuan untuk menentukan kebijakan dalam pengalokasian biaya pendidikan, juga pengakuan sosial terhadap lulusan atau hasil pendidikan.

Berdasarkan teori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai tahapan dalam pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan prinsip tersebut.

### 3) Efektif

Menurut Mulyasa (2005:82), efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil menempatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasional. Dari pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya semua tugas pokok, tercapainya tujuan, ketepatan waktu dan adanya partisipasi aktif dari anggota. Menurut Mulyasa (2005: 89) suatu kegiatan dikatakan efektif jika tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Efisiensi mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Dharma juga menjelaskan bahwa efisiensi juga merupakan perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, perbelanjaan dan masukan, biaya, serta kesenangan yang dihasilkan.

### 4) Transparansi

Transparansi Menurut Engkoswara (2012:295) manajemen sekolah dilaksanakan secara transparan, mudah diakses anggota, manajemen memberikan laporan secara kontinu sehingga *stakeholders* dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah. Manajemen pendidikan yang transparan memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan keyakinan *stakeholders* terhadap kewibawaan dan citra sekolah yang *good governance* dan *clean governance*. Menurut Krina (2003:14) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Krina, prinsip transparansi memiliki dua aspek yakni komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dalam hal ini adalah masyarakat dan warga sekolah dapat diperoleh secara langsung. Pengelolaan dana harus dilakukan secara terbuka agar warga sekolah dan masyarakat dapat memberikan saran, kritik, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program. Krina (2003:15) menjelaskan bahwa prinsip transparansi paling

tidak dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti: 1) Mekanisme yang menjamin sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik 2) Mekanisme yang memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik, maupun proses-proses didalam sektor publik. 3) Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan maupun penyebaran informasi maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani.

5) Akuntabel

Menurut PP no 48 Tahun 2008 pasal 59, prinsip akuntabilitas dilakukan dengan memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2009:20) akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien kepada pemberi tanggung jawab. Menurut Fattah (2013:93), ukuran pendidikan yang akuntabel adalah: 1) Tujuannya jelas dan dapat dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus 2) Kegiatannya dapat diawasi agar selalu dapat mengarah pada pencapaian tujuan 3) Hasilnya efektif karena tujuan tercapai 4) Proses pencapaian hasil itu efisien dengan mengingat sumber-sumber yang tersedia 5) Menjalankan mekanisme umpan balik untuk penyempurnaan. Tuntutan akuntabilitas sekolah sebagai salah satu sektor publik adalah untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Ada empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu: a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (*accountability for probity and legality*) b) Akuntabilitas proses (*process accountability*) c) Akuntabilitas program (*program accountability*) d) Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*)

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan kajian literatur jurnal karena penelitiannya menghasilkan data deskriptif yang membahas mengenai pengelolaan manajemen kas pada lembaga pendidikan. Penelitian deskriptif yang peneliti lakukan, tidak menggunakan uji hipotesis akan tetapi hanya menggunakan data observasi dan kajian literatur.

## III. HASIL PEMBAHASAN

### A. Aktivitas Pembiayaan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam.

Sumber-sumber dana yang dimiliki oleh **SMP Muhammadiyah 4 Sukodono** yaitu dari :

a. Dana dari pemerintah

Dana dari pemerintah disediakan melalui anggaran rutin yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pengeluaran dan pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana BOS harus sesuai dengan anggaran dan peraturan yang ada untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah dan peningkatan mutu siswa. Sekolah tidak diijinkan untuk menarik uang SPP kepada para siswa, sehingga siswa tidak mengeluarkan uang untuk pembayaran SPP. Semua dana operasional sekolah bersumber dari dana BOS. Siswa tidak dipungut biaya SPP dan uang gedung atau dana pembangunan.

b. Dana dari Yayasan

Dana ini diterima sekolah yang berasal dari bantuan yayasan. Di SMP Muhammadiyah 4 Sukodono ini merupakan sekolah menengah pertama dibawah naungan yayasan muhammadiyah, sehingga yayasan muhammadiyah memberikan bantuan dana. Dana dari yayasan ini dikirim langsung ke Kepala Sekolah yang digunakan untuk gaji kepala sekolah.

c. Dana Hibah dari Donatur

Dana ini biasanya merupakan sumbangan sukarela yang tidak mengikat dari pihak internal. Sumbangan sukarela yang diberikan merupakan wujud

kepedulian untuk membantu kegiatan operasional dan mendukung kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah. Dana ini biasanya diterima dari perorangan dari pihak internal sekolah.

d. Dana dari Kegiatan Wirausaha

Sekolah mengadakan kegiatan usaha untuk menambah dana. Dana ini merupakan hasil dari kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dilakukan oleh staff sekolah seperti koperasi sekolah. Akan tetapi koperasi kurang berjalan dengan lancar karena tidak ada pengelolaan yang baik.

Sumber-sumber dana yang dimiliki oleh **MA Al-Islam Surakarta** yaitu dari:

- 1) Kas Berjalan  
Dana yang berasal dari Madrasah, Yayasan dan bantuan pemerintah yang digunakan untuk biaya Gaji Guru.
- 2) Dana Pengembangan  
Dana yang berasal dari Biaya yayasan Al-Islam
- 3) Sumbangan Pelayanan Pendidikan (SPP)  
Dana yang berasal dari dana partisipatif orang tua
- 4) Dana Kegiatan Siswa (DKS)  
Dana dari dinas Dikpora Surakarta (Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga)
- 5) Penerimaan Seragam, Tas, Atribut dan Map  
Dana yang berasal dari Penerimaan siswa Baru
- 6) Pendaftaran PPDB dan OPD  
Dana yang berasal dari Penerimaan siswa Baru
- 7) Bantuan Pemerintah  
Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat
- 8) Pendapatan Laing yang Sah dan Halal.  
Dana yang berasal dari pendapatan lain lain
- 9) Infaq dan Hibah  
Dana yang berasal dari amal pihak lain.

**B. Pengelolaan Keuangan Sekolah pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam.**

Pengelolaan keuangan pada lembaga sekolah dimulai dari perencanaan (planning), pelaksanaan (actuating), pencatatan, pertanggung jawaban atau pengawasan (controlling) serta pelaporan (reporting) sebagai berikut:

1. Pada perencanaan keuangannya, Sekolah melakukan penganggaran diawal tahun yang dipaparkan pada RKS (Rancangan Kerja Sekolah). Perencanaan dana dilakukan untuk satu tahun ajaran, namun dana tidak langsung diterima untuk satu tahun melainkan per 3bulan atau waktu berkala. Permasalahan pada proses perencanaan adalah saat rapat komite dengan wali murid sulit mencapai kesepakatan besarnya penentuan biaya SPP (Sumbangan Pelayanan Pendidikan).
2. Pada tahap pelaksanaan, ketika penerimaan dan penggunaan dana disertai bukti bayar atau bukti transaksi. Bukti transaksi tersebut akan dilampirkan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak pihak terkait. Segala sesuatu dana yang dikeluarkan adalah bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Permasalahan pada proses pelaksanaan adalah sulitnya penagihan yang tidak terbayarkan.
3. Pada proses pencatatan keuangan telah dicatat dengan baik dan tidak terdapat pencatatan peminjaman kepada bank. Permasalahan pada proses pencatatan keuangan ini terdapat pada pembagian tugas bendahara. Pada MA Al-Islam hanya terdapat fungsi bendahara umum dan pengeluaran, yang mana bisa dibedakan menjadi 3 umum, penerimaan dan pengeluaran.
4. Pertanggung jawaban laporan pendanaan sekolah di audit oleh yayasan setiap tahun sebagai pengawasan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya diaudit oleh tim akreditasi setiap 5tahun sekali.

5. Pada proses pelaporan keuangan di MA Al-Islam Surakarta dilakukan kepada 3 pihak yaitu Kementerian Agama untuk pelaporan dana Bos, Dikpora untuk pelaporan Dana Kegiatan Sekolah, serta Yayasan Al-Islam dan Muhammadiyah terkait pelaporan SPP.

### C. Penerapan Pengelolaan Keuangan di Lembaga Pendidikan Muhammadiyah dan Al-Islam sesuai dengan teori pengelolaan keuangan.

Berdasarkan teori pengelolaan keuangan tanggung jawab untuk penganggaran dan pelaporan keuangan telah diserahkan kepada sekolah, akan tetapi pengawasan menjadi tanggung jawab pemerintah. Bagaimana sekolah mengoperasionalkan tanggung jawab yang luas untuk peningkatan mutu melalui pengelolaan keuangan. Menurut Tooley dan Guthrie (2007) dalam jurnalnya yang berjudul *Budgeting in New Zealand secondary schools in a changing devolved financial management environment* anggaran merupakan pedoman untuk belanja, anggaran sebagai perangkat pengendali yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menjaga efisiensi keuangan. keterbatasan anggaran akan berdampak pada sistem pengelolaan keuangan internal.

Menurut literatur anggaran (Covaleski, 2013; Horngren *et al*, 2013; Drury, 2012) dalam Mah'd (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *The Ministry of Higher Education's Role in Private Jordanian Universities and The Hidden Tool of The Budget* bahwa anggaran itu penting dan fakta bahwa anggaran dapat meningkatkan kinerja manajerial dan dapat mengontrol biaya. Mah'd juga mengemukakan bahwa kinerja manajerial universitas swasta di Yordania tidak diukur dengan membandingkan realisasi dan hasil yang dianggarkan. Perguruan tinggi swasta hanya menerapkan anggaran hanya karena hal itu wajib.

Pengeluaran pendidikan dianggap sebagai investasi, yang membentuk salah satu yang nyata. Rasio yang tepat dari pengeluaran dapat dipertahankan dengan menjaga keseimbangan antara pengeluaran untuk guru dan proses pembelajaran siswa serta pengeluaran untuk manajemen. Menurut Yunas (2014) dalam jurnalnya yang berjudul *Financial Management for Improving Efficiency of School: Issues and Concerns* Lebih dari 50% dari total belanja pendidikan dialokasikan untuk staf gaji. Di negara-negara berkembang bahkan lebih dari 80% dihabiskan untuk gaji staf dan di Pakistan lebih dari 96%. Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan SMP Muhammadiyah 4 Sukodono sudah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan. Kegiatan pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien, akan tetapi masih perlu banyak perbaikan. Sekolah kurang melakukan perencanaan, karena sekolah masih sering menggunakan anggaran tahun sebelumnya.

Dalam jurnal yang berjudul "*Public finance regulatory compliance among public secondary schools*" Gorrettie (2016) menjelaskan hubungan antara tindakan pencegahan, dukungan kepemimpinan dan keuangan publik kepatuhan peraturan di sekolah-sekolah menengah umum di Uganda. Hal ini sesuai dengan keadaan sekolah MA Al-Islam Surakarta yang pada pelaporan keuangan juga menerapkan pelaporan kepada beberapa pihak.

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan, kepala sekolah memiliki otoritas penuh terhadap pengeluaran keuangan. Setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kepala sekolah. Pelaksanaan pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yaitu: Transparansi, akuntabel, efektif, dan efisien.

#### 1. Transparansi

Transparan dalam bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola semua kegiatan. Termasuk keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan sekolah, karena dana berasal dari Kementerian Agama untuk pelaporan dana Bos, Dikpora untuk pelaporan Dana Kegiatan Sekolah, Yayasan Al-Islam dan Muhammadiyah terkait pelaporan SPP, Transparansi kepada Orang Tua Murid Dilakukan ketika rapat komite dengan wali murid.

2. Akuntabel

Akuntabel didalam manajemen keuangan berarti penggunaan dana sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah akan membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Dalam mempertanggung jawabkan kegiatan pengelolaan keuangan sekolah berdasarkan yang telah ditetapkan dalam anggaran dan disertai dengan bukti-bukti penerimaan atau bukti pembayaran.

3. Efektif

Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas jika kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitas *outcome*-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan di lembaga sekolah sudah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan yang ditetapkan di RKAS. Antara perencanaan penganggaran dan aktivitas realisasi sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang ditetapkan.

4. Efisien

Prinsip efisiensi dalam pengelolaan keuangan sekolah merupakan pemberdayaan sumber daya uang sekolah dalam mencapai optimalisasi akses, mutu, relevansi, dan daya saing pelayanan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa prinsip efisiensi yaitu pemberdayaan uang sekolah digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu dan pelayanan pendidikan. Di kedua Lembaga Pendidikan sudah dialokasikan secara efisien guna meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan seperti pengadaan LKS atau buku-buku pegangan siswa dan gaji guru guna menambah wawasan dan ilmu yang dimiliki siswa.

#### IV. KESIMPULAN

##### A. Kesimpulan

Tahap	Pelaksanaan	Prinsip
Perencanaan	Penganggaran diawal tahun yang dipaparkan pada RKS (Rancangan Kerja Sekolah) dan disampaikan pada saar rapat komite.	Prinsip Efektifitas : Mencegah adanya kekurangan dana.
Pelaksanaan	Penerimaan dan penggunaan dana disertai bukti bayar atau bukti transaksi yang diserahkan terimakan bendahara.	Prinsip Efisiensi : bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.
Pencatatan	Pencatatan keuangan telah dicatat dengan baik dan tidak terdapat pencatatan peminjaman kepada bank.	Akuntabel : Pencatatan harian, bulanan dan rekap tahunan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pihak terkait.
Pertanggungjawaban	Pertanggung jawaban laporan pendanaan sekolah di audit oleh yayasan setiap tahun sebagai pengawasan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya diaudit oleh tim akreditasi setiap 5tahun sekali.	Prinsip Transparansi: Pada rancangan tidak diperbolehkan terdapat dana lain-lain atau biaya lain-lain atau biaya tak terduga semua biaya harus jelas penganggaran dan pengalokasian.
Pelaporan	Pelaporan keuangan dilakukan kepada 3 pihak yaitu Kementrian Agama untuk pelaporan dana Bos, Dikpora untuk pelaporan Dana Kegiatan Sekolah, serta Yayasan Al-Islam dan Muhammadiyah terkait pelaporan SPP.	

## **B. Saran**

Untuk penanganan tak terbayarkan sebaiknya sekolah menganggarkan diawal perencanaan, supaya ketika terjadi hal tersebut sekolah tidak mengalami kekurangan anggaran atau defisit. Dari segi pembagian tugas bendahara sebaiknya dilakukan pemisahan tugas untuk bendahara umum dan bendahara pengeluaran tidak dilakukan oleh orang yang sama.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Dalam penulisan artikel ilmiah ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Dr. Sulilaningsih M.Bus selaku dosen Manajemen Keuangan yang membimbing kami hingga terselesaikan artikel ini. Dr. Dewi Kusuma Wardhani, M.Si, selaku ketua program studi Magister Pendidikan Ekonomi dan Drs. Sunarto, M.M, selaku ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi atas motivasi dan inspirasi yang diberikan beliau kepada penulis dan penulis juga mengucapkan terimakasih atas dukungan dari teman-teman MPE angkatan XIV.

## **REFERENSI**

- Engkoswara dan Aan Komariah. (2012). *Administrasi Pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Fattah. (2013). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Fattah, Nanang. (2009). *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT Remada Rosdakarya Offset.
- Halim, A. dan Muhammad Syam K. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Krina Lalolo. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyasa. (2009). *Manajemen Berbasis Sekolah : Konsep, Strategi dan Implementasi*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang *Pendanaan Pendidikan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

## **Referensi Jurnal:**

- Agustinus. (2012). *School-based management developments: challenges and impacts*, Journal of Educational Administration, Vol. 50 Iss 6 pp. 845 - 873
- Gorrettie K, Venancio T, Joseph M & Stephen K. (2016). *Public finance regulatory compliance among public secondary schools*. International Journal of Social Economics, Vol. 43 Iss 11 pp. 1135 - 1155
- Mah'd, O. A. (2014). The Ministry of Higher Education's Role in Private Jordanian Universities and The Hidden Tool of The Budget. *Education, Business and Society: Contemporary Middle Eastern Issues*, Vol 7 Iss 2/3, 133-151.
- Tooley, S. Guthrie, J. (2007). Budgeting in New Zealand secondary schools in a changing devolved financial management environment. *Journal of Accounting & Organizational Change*, Vol. 3 Iss 1 pp. 4 – 28.
- Yunas, M. (2014). Financial Management for Improving Efficiency of School: Issues and Concerns. *International Journal of Education and Social Science*, Vol 1 (1).
- Wijaya, David. (2009). Implikasi Manajemen Keuangan Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan.. *Jurnal Pendidikan Penabur*, Nomor 13 Tahun ke 8. Hal 80-96.